

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012: 94) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset”

Adapun menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Sementara menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”.

Dari definisi-definisi di atas penulis mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu system yang mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, serta pelaporan baik secara manual, maupun komputerisasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anngaran lain terkait keuangan daerah

2.1.1.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2007:40) adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi)”.

Dari pengertian dapat dikatakan bahwa proses pokok dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian

Tahap ini merupakan tahap yang paling pertama dari tahapan siklus akuntansi yakni dengan cara mengidentifikasi transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan menangkap peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan salah satu fungsi penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak tepat ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang salah atau tidak tepat.

3. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry. Dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

4. Pelaporan

Setelah semua proses selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:39) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.”

Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Kemudian, akuntabilitas menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) yaitu sebagai berikut :

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan atas kinerja, dan tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan terhadap pihak lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Rakhmat, 2017:145).

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*),
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*),
3. Akuntabilitas program (*program accountability*),
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law 22 enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut

2.1.3 Motivasi Kerja

2.1.3.1 Pengertian Motivasi Kerja

Definisi Motivasi menurut menurut Hasibuan (2013:141) adalah sebagai berikut:

“Motivasi berasal dari kata Latin *movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi (*motivation*) dalam manajemen hanya ditujukan

pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan”.

Kemudian Definisi Motivasi menurut Serdamayanti (2014:233) adalah sebagai berikut:

“Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan.”

Selanjutnya Motivasi menurut menurut Edy Sutrisno (2016:128) adalah sebagai berikut:

“Menjelaskan motivasi adalah kondisi yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi secara maksimal.”

Dari definisi – definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa motivasi adalah Dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk mengarahkan daya dan potensi agar mewujudkan prestasi sesuai dengan yang diinginkan.

2.1.3.2 Indikator Motivasi kerja

Indikator motivasi kerja menurut Suwanto (2011:177) sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan fisik, di tunjukan dengan : kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan paling dasar.
- 2) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologi dan intelektual.

- 3) Kebutuhan social, yakni kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan mencintai serta dicintai.
- 4) Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk di hormati, dan di hargai oleh orang lain.
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat, dengan menggunakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu.

2.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsum (2006:81) definisi Kinerja Pemerintah Daerah adalah :

“Kinerja Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari pencapaian program/kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi.

Menurut Eko Widodo (2015:133) menjelaskan pengertian kinerja adalah ;

“Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.”

Menurut Chabib Soleh dan Suropto (2011:3) Pengertian Kinerja adalah:

“Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning)suatu organisasi”.

Berdasarkan definisi – definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi misi dan tujuan dalam suatu organisasi

2.1.4.1 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006: 83) menyatakan Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada.
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (Process). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
3. Indikator keluaran (Output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Misalnya :

- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya
- a. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka indikator Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Proses (*Process*),
3. Indikator Keluaran (*Output*)
4. Indikator Hasil(*Outcome*)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:27) menyatakan sebagai berikut: “Sistem dan prosedur yang dimaksudkan dalam bidang akuntansi disebut dengan sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara atau penganggaran sektor publik, sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan pada tahap pelaksanaan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah”.

Menurut Mardiasmo (2018:84) bahwa: “Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut”.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat (2015) yang Hasil studi ini menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya menurut Ismail Molamahu (2015). Hasil studi ini menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009) Hasil studi ini menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dapat disimpulkan bahwa system akuntansi keuangan daerah berperan penting bagi kinerja instansi pemerintah karena system akuntansi keuangan sebagai instrument untuk mencapai sasaran atau program, dan mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter

2.2.2 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah

Menurut Rakhmat (2017:143) akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, berdasarkan fungsinya menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil selama operasinya suatu entitas untuk *me-review* sebagaimana halnya dengan perusahaan, lembaga pemerintahan untuk menilai kinerjanya.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:124) :
“Akuntabilitas keuangan yang baik akan berpengaruh pada penilaian kinerja di dalam instansi pemerintah untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Teori diatas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Lucy Auditya (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Pendapat serupa juga didukung oleh penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena akuntabilitas yang baik akan menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik

2.2.3 Motivasi Kerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah

Menurut Griffin *et.al* (2013:177) Motivasi adalah serangkaian kekuatan yang menyebabkan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu. Tinggi rendahnya motivasi seseorang akan menentukan besar kecilnya kinerja seseorang. Bila seseorang termotivasi, maka akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Supaya karyawan menjalankan tugasnya dengan baik, maka perusahaan akan memotivasi karyawan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap kejujuran, pengabdian, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan kinerja yang baik.

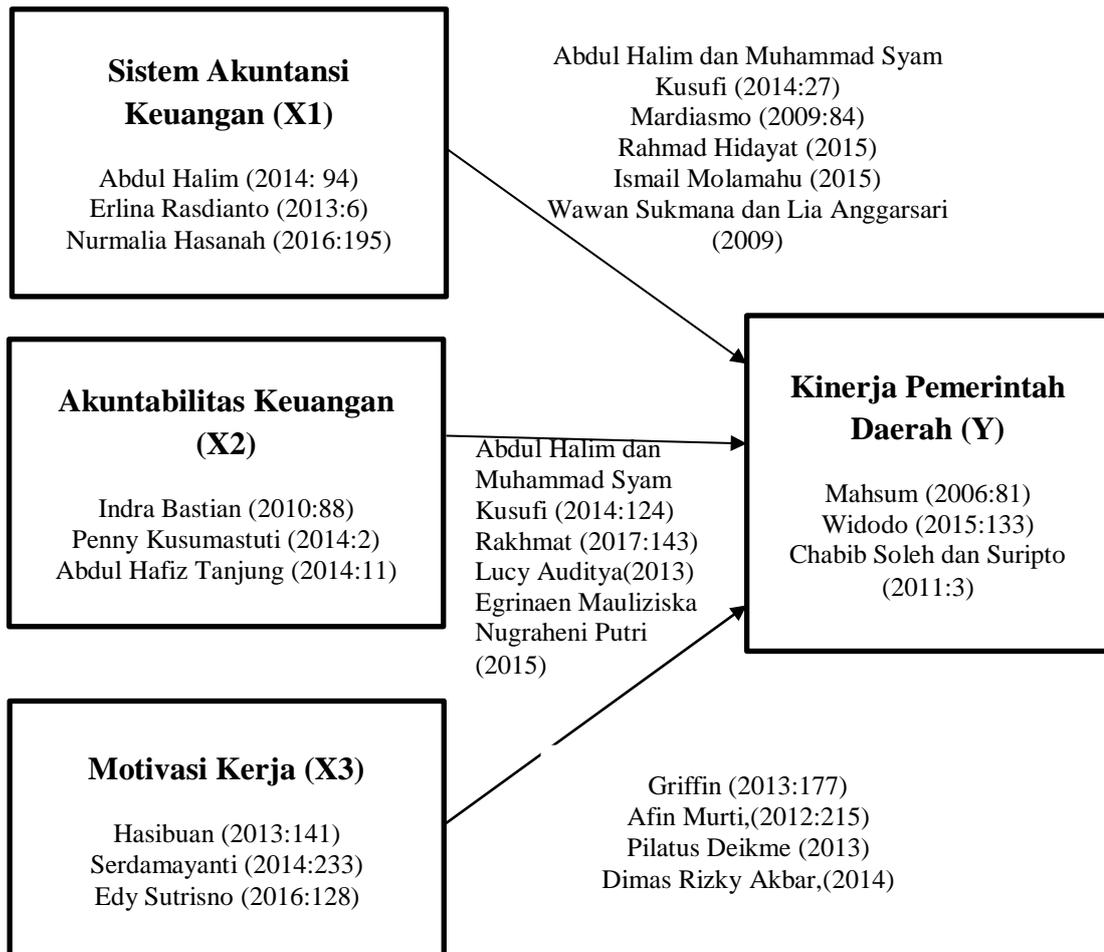
Kemudian menurut (Afin Murti,2012:215). “Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi karyawan agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan supaya karyawan mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal, sehingga dengan adanya motivasi yang baik dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja karyawan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Pilatus Deikme 2013),dan menurut penelitian (Nelfiane Datalamon, 2018) mengatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

Dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena motivasi menentukan besar kecilnya kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai hasil yang optimal

2.2.4 Paradigma Kerangka Pemikiran

Agar lebih mengetahui dan mengerti kerangka pemikiran pada penelitian yang telah dipaparkan, oleh sebab itu akan digambarkan pada paradigma penelitian melihat bagaimana hubungan antar variabel dipenelitian ini :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Umi Narimawati (2008:63) menyatakan bahwa hipotesis penelitian ialah merupakan asumsi temporer yang bermanfaat sebelum dilaksanakan penelitian. Dan hipotesis adalah suatu hasil akhir yang masih terbatas atau hasil laporan yang kurang lengkap.

Maka sesuai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian berarti sebagai hasil sementara yang masih harus dicari bukti fakta – faktanya, untuk mendapatkan hasil sementara dengan benar dan dari hipotesis peneliti yang telah dicatat dalam kerangka penelitian, inilah hipotesis penelitian yang telah dikaji sebagai berikut :

H1 : Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H2 : Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

H3 : Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah